

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGUPAHAN, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

NUR SYIFA FAOZIAH

NIM : 4117256

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGUPAHAN, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

NUR SYIFA FAOZIAH

NIM : 4117256

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Syifa Faoziah

NIM : 4117256

Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 November 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is yellow and red, with the number '10000' and the text 'SERBUPERSAMA' and 'MEPERTEMUR' visible. The signature is stylized and appears to be 'Nur Syifa Faoziah'.

Nur Syifa Faoziah

NOTA PEMBIMBING

Tsalis Syaifuddin, M.Si.

Plalangan RT.05 RW.01 Gunungpati Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Syifa Faoziah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Nur Syifa Faoziah**

NIM : **4117256**

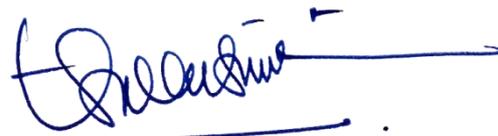
Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Februari 2022

Pembimbing,



Tsalis Syaifuddin, M. Si.

NIP. 19870803 201801 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan,
Email : www.febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Nur Syifa Faoziah**
NIM : **4117256**
Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M.

NIP. 19820527 201101 1 005

Penguji II

Aenurofik, M.A.

NIP. 19820120 201101 1 001

Pekalongan, 17 Mei 2022



Dr. H. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

ABSTRAK

NUR SYIFA FAOZIAH. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019).

Rendahnya kualitas SDM menjadi masalah utama yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat sulit terpenuhi sehingga rendahnya kesejahteraan hidup. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas SDM suatu wilayah yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM secara parsial dan simultan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019 ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari *website* BPS Jawa Tengah tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi data panel dengan model estimasi terbaik berupa *Random Effect Model* dengan bantuan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengupahan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Perspektif ekonomi Islam memandang pembangunan sebagai aktivitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia sebagai *khalifah fil arḍ* memiliki tanggung jawab dan tugas besar dalam pemeliharaan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan agar setiap individu dapat memperbaiki kualitas hidupnya agar dapat mengemban amanahnya dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup antara lain menuntut ilmu (pendidikan), menjaga kesehatan dengan baik, serta rajin bekerja (ekonomi).

Kata kunci : IPM, Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Islam

ABSTRACT

NUR SYIFA FAOZIAH. The Influence of Poverty Levels, Wages, and Economic Growth on the Human Development Index (HDI) is reviewed from an Islamic Economic Perspective (Case Study of the Ex-Pekalongan Residency Region 2015-2019).

The low quality of human resources is a major problem that often occurs in several regions in Indonesia. The low quality of human resources causes the needs of people's lives to be difficult to fulfill so that the welfare of life is low. One of the indicators to measure the success of efforts to build the quality of human resources in a region is the Human Development Index (IPM). Some areas in the former Pekalongan Residency area have lower HDI scores compared to other areas in Central Java Province. The purpose of this study was to analyze the effect of poverty, wages, and economic growth on HDI partially and simultaneously in the area of the former Pekalongan Residency in 2015-2019 in terms of an Islamic economic perspective.

This research is a type of library research with a quantitative approach. The data used in the form of secondary data sourced from the Central Java BPS website for 2015-2019. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis with the best estimation model in the form of the Random Effect Model with the help of Eviews 10.

The results showed that the level of poverty and economic growth had a significant negative effect on HDI. While wages have a significant positive effect on HDI. The level of poverty, wages, and economic growth simultaneously have a significant effect on the HDI. The Islamic economic perspective views development as an activity that is indispensable in improving people's welfare. Humans as khalifah fil ar have a big responsibility and task in maintaining the earth and the creatures in it. Therefore, Islam recommends that every individual can improve the quality of his life in order to carry out his mandate properly. Some steps that can be taken to improve the quality of life include studying (education), maintaining good health, and working diligently (economy).

Keywords: HDI, Poverty Rate, Wages, Economic Growth, and Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
2. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
3. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Tsalis Syaifuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Achmad Tubagus Surur, Dr. M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

7. Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M. dan Aenurofik, M.A. selaku dosen penguji
8. Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang telah menyediakan data-data yang saya perlukan
9. Kedua orang tua dan kakak saya yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, semangat, kesabaran, serta doa yang selalu dipanjatkan terutama selama saya menempuh program Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan
10. Keluarga besar yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya.
11. Teman-teman kos dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, doa, serta banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat, memotivasi, dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 11 November 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Landasan Teori	19
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
a. Konsep Indeks Pembangunan Manusia	19
b. Pengukuran dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	22
c. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	24
2. Tingkat Kemiskinan.....	27
a. Konsep dan Pengukuran Kemiskinan	27
b. Macam-macam Kemiskinan	28
c. Penyebab dan Dampak Kemiskinan	29
d. Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan IPM	30
e. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	30
3. Pengupahan	33
a. Konsep dan Jenis Upah.....	33
b. Kebijakan Pengupahan di Indonesia.....	34
c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).....	36

d.	Hubungan Upah Minimum dengan IPM	37
e.	Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
4.	Pertumbuhan Ekonomi	40
a.	Konsep dan Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	40
b.	Komponen Dasar Pertumbuhan Ekonomi	42
c.	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM	43
d.	Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	44
B.	Telaah Pustaka	46
C.	Kerangka Berpikir	52
D.	Hipotesis	56
BAB III	METODE PENELITIAN	58
A.	Jenis Penelitian	58
B.	Pendekatan Penelitian	58
C.	Setting Penelitian	59
D.	Populasi dan Sampel	59
E.	Variabel Penelitian	60
F.	Sumber Data	62
G.	Teknik Pengumpulan Data	63
H.	Metode Analisis Data	63
1.	Regresi Data Panel	63
2.	Model Regresi Data Panel	64
3.	Pemilihan Model Terbaik Pengujian Data Panel	66
4.	Uji Asumsi Klasik	67
5.	Uji Statistik	70
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	72
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	72
B.	Deskripsi Variabel Penelitian	89
C.	Analisis Data	103
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	122
BAB V	PENUTUP	146
A.	Simpulan	146
B.	Keterbatasan Penelitian	150
C.	Saran	151
	DAFTAR PUSTAKA	154
	LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan hasil pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	be
ت	tā`	t	te
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	je
ح	hā`	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fā`	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	Hā`	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh : مُتَعَدِّدَةٌ ditulis *muta'addidah*

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sambung al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan damah), ditulis t

Contoh : زَكَاةُ الْفِطْرِ dibaca *zakātul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan damah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyah*
كَرِيمٌ ditulis *karīm*
فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + yà tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh : بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*
قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-*

Contoh : الْقِيَاسُ ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf I (el) diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

Contoh : الشَّمْسُ ditulis *as-syam*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab, la Tahzan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai IPM wilayah Karesidenan Pekalongan dan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 1.2	Peringkat Lima Besar IPM Terendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1	Analisis Statistik Deskriptif	90
Tabel 4.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019 (dalam satuan persen).....	91
Tabel 4.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019 (dalam satuan persen).....	94
Tabel 4.4	Perkembangan Upah Minimum Kab./Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019 (dalam satuan rupiah).....	98
Tabel 4.5	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019 (dalam satuan persen).....	100
Tabel 4.6	Hasil Output Estimasi CEM	104
Tabel 4.7	Hasil Output Estimasi FEM.....	105
Tabel 4.8	Hasil Output Estimasi REM	106
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow.....	107
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman	108
Tabel 4.11	Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji LM	109
Tabel 4.12	Hasil Output Estimasi Regresi Data panel REM	110
Tabel 4.13	Nilai <i>Intercept</i> (Konstanta) setiap Individu	112
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas	117
Tabel 4.15	Hasil Uji t.....	118
Tabel 4.16	Hasil Uji F.....	120
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peringkat Nilai IPM Wilayah Eks Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	55
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	73
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian,	I
Lampiran 2	Hasil <i>Output</i> CEM,	II
Lampiran 3	Hasil <i>Output</i> FEM,	III
Lampiran 4	Hasil <i>Output</i> REM,	IV
Lampiran 5	Hasil <i>Output</i> Uji <i>Chow</i> ,	V
Lampiran 6	Hasil <i>Output</i> Uji <i>Hausman</i> ,	VI
Lampiran 7	Hasil <i>Output</i> Uji LM,	VII
Lampiran 8	Hasil <i>Output</i> REM menggunakan <i>Pool Data</i> ,	VII
Lampiran 9	Hasil Uji Normalitas,	VIII
Lampiran 10	Hasil Uji Multikolinearitas,	IX
Lampiran 11	Riwayat Hidup Penulis,	IX

DAFTAR ISTILAH

Akumulasi	Pengumpulan, penimbunan, atau penghimpunan modal
Apatis	Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar
Apolitik	Tidak berminat pada politik
<i>Falāh</i>	Kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat
<i>Gap</i>	Celah (kesenjangan)
Hipotesis	Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya
<i>Khalīfah fil Arḍ</i>	Pemimpin (wakil Allah) di muka bumi
<i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud)
Paradigma	Cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir untuk meraih beberapa tujuan
<i>Pro</i>	Sebuah bentuk reaksi yang dimana baik, positif maupun setuju terhadap segala macam bentuk hal
Probabilitas	Peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian, terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi

Signifikan Sesuatu yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak, dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan

Sunnatullah fil Hayah Ketentuan Allah dalam kehidupan

Terminologi Ilmu yang menjelaskan tentang batasan dan definsi istilah serta penggunaannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dianggap sebagai fenomena ekonomi yang biasa sebelum tahun 1970-an. Dimana keberhasilan pembangunan ekonomi hanya dilihat pada pertumbuhan ekonomi saja, sehingga apabila pertumbuhan PDB suatu negara tinggi maka diasumsikan masyarakat tersebut sejahtera (Arataf dkk, 2018). Namun faktanya banyak negara berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Trianggara dkk, 2018). Seperti Indonesia, sepanjang tahun 2000-2017 PDB per kapita Indonesia meningkat dengan rata-rata 4% setiap tahunnya. PDB per kapita Indonesia menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara anggota G20 setelah Cina (9%) dan India (5,5%). Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia membawa dampak ketimpangan antar penduduk yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data Bank Dunia, indeks Gini Indonesia pada 2001-2014 mengalami peningkatan yakni dari 31,0 menjadi 41,0 (Tjoe, 2018). Sehingga pada dekade 2000-an adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dibarengi dengan peningkatan kemiskinan (Yusuf, 2017). Hal ini membuktikan pengukuran kesejahteraan masyarakat kurang relevan apabila dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja.

Bank Dunia pada 1990 memperluas makna pembangunan dengan menerbitkan suatu laporan pada World Development Report yang berisi :

“Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Kualitas hidup yang lebih baik lagi mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.”

Oleh sebab itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam pengukuran pembangunan yang terfokus pada manusia (*people centered*). Artinya, fokus utama pembangunan yakni membangun kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Manusia merupakan faktor yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi, karena manusia bertindak sebagai pelaku yang menjalankan perekonomian sekaligus sebagai sasaran pembangunan (Matondang, 2018). Sehingga manusia menjadi pondasi awal untuk mencapai kesejahteraan bangsa.

Saat ini pembangunan ekonomi Indonesia memfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam agenda pembangunan lima tahunan terakhir dalam kerangka RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2005-2025. Dilansir dalam berita Harian Kompas (2019), pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yakni RPJMN 2020-2024 akan diarahkan pada pembangunan yang berkualitas dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta keberlanjutan

lingkungan dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Hal ini sesuai amanat agenda pembangunan dunia yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Munculnya agenda ini pada 2015 tidak lain yakni untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan masyarakat, dan melindungi lingkungan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Pembangunan manusia menurut UNDP yakni proses menambah pilihan dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan, hidup layak, serta pelayanan kesehatan (BPS, 2015). Menurut Kuncoro, teori pembangunan pada generasi kedua banyak menekankan akumulasi modal manusia dengan menciptakan agen-agen pembangunan yang lebih produktif melalui pendidikan, kesehatan, terpenuhinya nutrisi yang baik, dan peningkatan keterampilan. Konsep pembangunan manusia menjadi cikal bakal lahirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 1990, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM yang diterbitkan oleh HDR (Human Development Report) dalam laporan tahunannya secara berkesinambungan (Ayub, 2018).

IPM adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat hasil dari upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM mempunyai tiga dimensi dasar dalam mengukur angka kesejahteraan suatu daerah yakni meliputi dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Menurut BPS pada 2010 dari ketiga dimensi tersebut diturunkan menjadi empat komponen yang dilihat dari metode baru antara lain angka harapan hidup sejak lahir (*life*

expectancy at birt), harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan pengeluaran per kapita disesuaikan (*purchasing power parity*). Pandangan Tambunan dalam Macmud dan Djau (2019) mengemukakan bahwa tingginya nilai IPM menunjukkan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pada hakikatnya manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Kesejahteraan manusia dalam Islam juga sangat diperhatikan yakni menjelaskan terkait kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat pada dampak kinerja pemerintah terhadap pembangunan manusia, yakni apakah sudah mencapai kemaslahatan umat dan keadilan ataupun sebaliknya (Triadani, 2017). Pembangunan dalam ekonomi Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja namun lebih condong pada aspek moral, spiritual, dan sosial. Tujuan utama pembangunan dalam Islam adalah terpenuhinya kesejahteraan manusia dalam segala kebutuhan dasar untuk mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat kelak (*al falāh*).

Konsep kesejahteraan Islam harus berpegang pada *maqāṣid asy-syarāh*. Imam Al-Ghazali meletakkan kesejahteraan manusia pada beberapa aspek yakni perlindungan terhadap kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ningrum dkk, 2020). Islam sudah mengajarkan untuk tidak meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah seperti pada ayat di bawah ini :

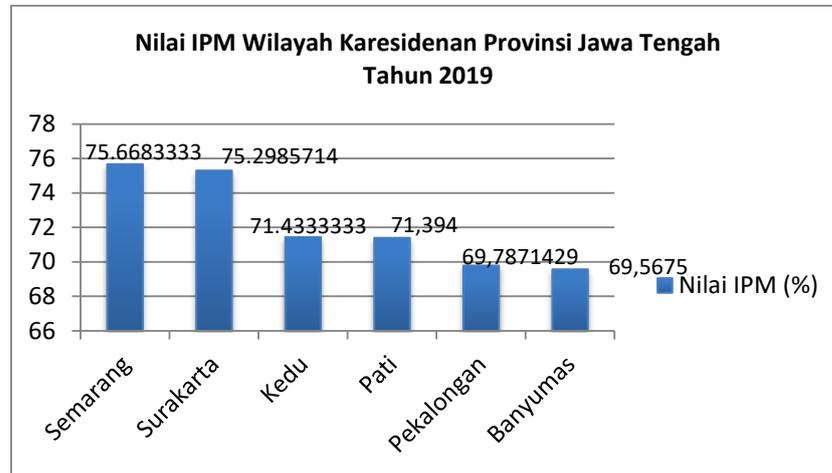
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (An-Nisa [4] : 9)

Maksud ayat di atas yakni untuk meningkatkan kesejahteraan maka diperlukan perkataan yang benar (jujur), meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan membantu meringankan beban orang lemah (miskin).

Tiap-tiap provinsi di Indonesia mempunyai peran penting dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia agar dapat bersaing dan tidak tertinggal jauh dari negara lain. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau utama salah satunya yakni Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi. Pada tahun 2019, nilai IPM tertinggi sampai terendah di Pulau Jawa antara lain DKI Jakarta (80,79%), DI Yogyakarta (79,99%), Banten (72,44%), Jawa Barat (72,03%), Jawa Tengah (71,73%), dan Jawa Timur (71,50%). Sehingga nilai IPM Jawa Tengah dan Jawa Barat berada di bawah nilai IPM nasional yakni 71,92%.

Gambar 1.1 Peringkat Nilai IPM Wilayah Eks Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : BPS Jawa Tengah, data telah diolah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari beberapa karesidenan antara lain Semarang, Surakarta, Kedu, Pati, Pekalongan, dan Banyumas. Sehingga kualitas pembangunan yang dimiliki tiap-tiap karesidenan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas pembangunan di Jawa Tengah. Pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM terendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yakni Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Banyumas. Dimana selisih keduanya sangat sedikit yakni 0,2196429%. Karesidenan Pekalongan dibagi menjadi beberapa daerah yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Dilihat dari data resmi BPS Jawa Tengah, tiap-tiap daerah di Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019 mengalami perkembangan nilai IPM yang positif setiap tahunnya walaupun belum memuaskan.

Tabel 1.1 Nilai IPM wilayah Karesidenan Pekalongan dan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Kabupaten Batang	65.46	66.38	67.35	67.86	68.42	67.094
Kabupaten Pekalongan	67.4	67.71	68.4	68.97	69.71	68.438
Kabupaten Pemalang	63.7	64.17	65.04	65.67	66.32	64.98
Kabupaten Tegal	65.04	65.84	66.44	67.33	68.24	66.578
Kabupaten Brebes	63.18	63.98	64.86	65.68	66.12	64.764
Kota Pekalongan	72.69	73.32	73.77	74.24	74.77	73.758
Kota Tegal	72.96	73.55	73.95	74.44	74.93	73.966
Provinsi Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73	70.568

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata peningkatan IPM dari tahun 2015-2019 yang paling tinggi yakni Kabupaten Tegal dengan rata-rata sebesar 0,8%. Sedangkan rata-rata peningkatan terendah sebesar 0,4925% diraih oleh Kota Tegal. Namun, Kota Tegal memperoleh nilai IPM tertinggi di Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019 dengan rata-rata nilai IPM sebesar 73,966% kemudian disusul Kota Pekalongan dengan selisih 0,208% dari Kota Tegal. Kota Tegal dan Kota Pekalongan mempunyai nilai IPM berada di atas nilai IPM Jawa Tengah setiap tahunnya. Namun, kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan daerah yang berada di kabupaten. Nilai IPM tiap-tiap daerah kabupaten berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya dengan selisih lumayan tinggi.

Tabel 1.2 Peringkat Lima Besar IPM Terendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2019

No.	Tahun	Nama-Nama Daerah dan Nilai IPMnya (%)
1	2015	Kab. Brebes (63.18), Kab. Pemalang (63.70), Kab. Banjarnegara (64.73), Kab. Tegal (65.04), dan Kab. Batang (65.46).
2	2016	Kab. Brebes (63.98), Kab. Pemalang (64.17), Kab. Banjarnegara (65.52), Kab. Tegal (65.84), dan Kab. Wonosobo (66.19).
3	2017	Kab. Brebes (64.86), Kab. Pemalang (65.04), Kab. Banjarnegara (65.86), Kab. Tegal (66.44), dan Kab. Wonosobo (66.89).
4	2018	Kab. Pemalang (65.67), Kab. Brebes (65.68), Kab. Banjarnegara (66.54), Kab. Tegal (67.33), dan Kab. Wonosobo (67.81).
5	2019	Kab. Brebes (66.12), Kab. Pemalang (66.32), Kab. Banjarnegara (67.45), Kab. Wonosobo (68.22), dan Kab. Tegal (68.24).

Sumber : BPS Jawa Tengah

Selain itu, tabel 1.2 di atas juga menunjukkan fakta bahwa ada beberapa daerah di wilayah Karesidenan Pekalongan yang memiliki nilai kesejahteraan yang masih rendah dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tengah. Pada tahun 2015, empat Kabupaten (Brebes, Pemalang, Tegal dan Batang) di Eks Karesidenan Pekalongan masuk ke peringkat lima besar paling bawah di Provinsi Jawa Tengah sedangkan tahun 2016-2019 terdapat tiga Kabupaten (Brebes, Pemalang, dan Tegal) yang masuk. Pada 2016, IPM Kabupaten Batang berhasil keluar dari peringkat lima besar terbawah nilai IPM Jawa Tengah yakni dengan adanya kenaikan capaian IPM paling tinggi dibandingkan daerah lainnya yakni sebesar 1,41%.

Kabupaten Tegal pada tahun 2017 berada pada peringkat empat terendah di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan masih banyaknya anak remaja yang tidak melanjutkan sekolah dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan rendahnya pelayanan kesehatan. Sedangkan Kabupaten Pemalang menempati urutan capaian IPM terendah kedua yakni sedikit lebih baik dari Kabupaten Brebes. Kemudian peringkat capaian nilai IPM paling memprihatinkan di Jawa Tengah yakni Kabupaten Brebes yang menunjukkan akan rendahnya kualitas pembangunan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya angka kemiskinan, rendahnya upah yang diperoleh, serta kurang tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, banyaknya daerah di Eks Karesidenan Pekalongan yang memiliki nilai IPM di bawah nilai IPM Jawa Tengah dan masuk ke peringkat lima besar terendah nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah maka perlu untuk ditindaklanjuti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di wilayah tersebut. Adanya peninjauan pembangunan manusia di wilayah Karesidenan Pekalongan ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan capaian IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia maka perlu diperhatikan pertumbuhan penduduk miskinnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat berjalannya pembangunan. Pengukuran kemiskinan menurut BPS yakni dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan melihat Garis Kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya dalam kebutuhan makanan dan non makanan dari sisi pengeluaran. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyaningrum dan Muta'ali, (2020) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada 2013-2018 memiliki hubungan negatif signifikan terhadap nilai IPM. Sehingga adanya jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat sehingga nilai IPM rendah.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, perkembangan jumlah penduduk miskin wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah penduduk miskin paling sedikit yakni Kota Pekalongan sebesar 6,60 % dan paling banyak dengan persentase sebesar 16,22 % yaitu Kabupaten Brebes. Namun pemerintah Kabupaten Brebes berhasil menurunkan angka kemiskinan paling banyak di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun dengan penurunan sebesar 3,57 % walaupun masih tertinggal jauh dengan daerah lain. Sedangkan Kabupaten Pemalang memiliki tingkat kemiskinan berada di bawah Kabupaten Brebes yakni sebesar 15,41%. Oleh sebab itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang berada jauh di atas tingkat kemiskinan Povinsi Jawa Tengah (10,8%). Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang merupakan dua dari lima daerah yang masuk dalam prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Sehingga pembangunan manusia daerah tersebut harus dilakukan dengan baik sebagai upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Berita dari BPS Brebes (2019) menurut Dr. Drs. Angkatno, SH, M.Pd sebagai kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes mengemukakan bahwa rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes ini karena belum dioptimalkannya beberapa potensi industri, yang mana menurut beliau apabila ada pemanfaatan kawasan industri maka tenaga kerja yang terserap akan banyak dan pendapatan dapat meningkat sehingga berdampak baik dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. Munculnya kemiskinan dapat menimbulkan beberapa konsekuensi yakni adanya kesengsaraan, tindak kejahatan, penduduk kelaparan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, adanya pengupahan juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesejahteraan ini tidak terlepas dari upah yang mereka peroleh khususnya bagi para buruh. Oleh sebab itu, penetapan kebijakan upah minimum oleh pemerintah Indonesia yakni untuk mencegah adanya suatu tindak sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh atau pekerja. Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 adanya pengupahan yang distandar minimalkan agar para buruh (pekerja) mendapat upah yang sesuai dengan standar hidup layak.

Hasil penelitian Cahyanti dan Fevriera (2020) bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2010-2019. Apabila terdapat peningkatan upah maka menyebabkan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal pembelanjaan.

Sehingga daya beli masyarakat akan meningkat sekaligus standar hidup layak pun terpenuhi. Adanya kenaikan tingkat upah maka akan memberikan dampak yang positif terhadap IPM. Namun, berbeda dengan hasil penelitian oleh Isnawati (2018) di beberapa kabupaten yang berada di Jawa Tengah pada 2011-2015 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kenaikan UMR terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.

Dilihat dari data BPS Jawa Tengah, perkembangan UMK di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun pada 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Kenaikan upah minimum dari tertinggi ke terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar Rp630.000, Kota Pekalongan sebesar Rp615.922,47, Kabupaten Tegal sebesar Rp592.000, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp588.885,05, Kota Tegal sebesar Rp556.000, Kabupaten Pemalang sebesar Rp524.600, dan Kabupaten Brebes sebesar Rp499.300. Pada 2019, upah minimum tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yakni Kota Pekalongan sebesar Rp1.906.922,47 dan terendah oleh Kabupaten Brebes sebesar Rp1.665.850. Kabupaten Brebes masuk dalam peringkat tiga besar nilai upah minimum terendah di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai indikator vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Todaro mengungkapkan beberapa komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi antara lain akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta majunya teknologi. Menurut penelitian

Nugraha (2017) pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jasasila, 2020). Dilihat dari data BPS Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan 2010 di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mengalami perubahan yang fluktuatif pada tahun 2015-2019. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2019 dari tertinggi sampai terendah yakni Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.

Pada tahun 2019, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang adalah tertinggi yakni sebesar 5,8% kemudian disusul Kota Tegal sebesar 5,77%, dan Kabupaten Brebes sebesar 5,72%. Kota Pekalongan yang memiliki nilai IPM yang masuk dalam kategori tinggi memiliki laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,5%. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ginting dkk dalam Herman (2018) mengenai salah satu alasan pembangunan manusia perlu diperhatikan yakni banyak dari negara berkembang (termasuk Indonesia) berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi gagal dalam menurunkan kesenjangan pembangunan manusia. Dan manusia dijadikan input dalam pertumbuhan ekonomi, apabila pembangunan manusia berhasil maka kualitas SDM akan semakin baik yang mana dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi meningkat secara terus menerus yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan upah yang layak serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan perlu diteliti sebab terjadi kesenjangan yakni banyak daerah yang memiliki nilai IPM di bawah nilai IPM Jawa Tengah serta peringkat lima besar terbawah nilai IPM Jawa Tengah di dominasi oleh daerah yang berada di Karesidenan Pekalongan. Kemudian ada dua daerah di Karesidenan Pekalongan yang masuk ke dalam prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Brebes memiliki upah minimum yang masuk kategori rendah di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Pekalongan mengalami perubahan fluktuatif namun nilai IPM tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih sedikit. Oleh sebab fenomena di atas maka penulis memformulasikan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengupahan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015-2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh pengupahan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengupahan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019.

- c. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019.
- d. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019.
- e. Untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- i. Bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dalam menentukan dan memperbaiki kebijakan terkait pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ii. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai keadaan pembangunan manusia di wilayah mereka tinggal sehingga diharapkan adanya dukungan dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah.
- iii. Bahan media belajar dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan IPM dalam tinjauan ekonomi Islam.

b. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ekonomi syariah khususnya mengenai pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam, serta menambah dan memperluas informasi mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dari beberapa bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan fenomena yang terjadi dan menjadi sebab munculnya penelitian ini dilakukan. Penempatan pendahuluan pada bagian teratas karena sebuah penelitian dapat diteliti apabila terdapat permasalahan yang muncul dan penting untuk diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Penempatan landasan teori pada bab ii karena sudah diketahui permasalahan apa saja yang muncul (pendahuluan) maka dapat ditentukan teori apa yang sesuai yang mana akan diuji dalam penelitian kuantitatif ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penempatan bab iii ini karena sebelum data dapat dianalisis dan diinterpretasi maka perlu diketahui terlebih dahulu perolehan data yang akan diolah serta teknik analisis yang sesuai dengan metode yang akan digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi temuan-temuan dalam penelitian dan hasil analisis data serta interpretasinya. Bab ini ditempatkan setelah metode penelitian karena data penelitian dapat diolah setelah mengetahui metode yang digunakan. Sehingga lebih terarah dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Bagian penutup ditempatkan paling akhir karena bab sebelumnya sudah memperoleh hasil penelitian berdasarkan tujuan yang diteliti sehingga perlu ditutup dengan memberikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta dilengkapi dengan keterbatasan penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil uji t dengan model terbaik *random effect model*, tingkat kemiskinan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0011 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0011 < 0,05$) serta nilai koefisiennya sebesar -0,207107. Hal ini berarti pembangunan sulit terwujud apabila masih banyaknya masyarakat yang miskin. Tingkat kemiskinan yang meningkat maka masyarakat menggunakan waktu dan tenaganya hanya untuk bekerja dengan pendapatan yang masih rendah (belum mencukupi). Sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka otomatis terabaikan karena untuk makan sehari-hari saja mereka masih kesulitan, hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang rendah. Persoalan kemiskinan sampai sekarang belum bisa teratasi dengan baik karena lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan dan sentralisasi kebijakan. Selain itu, bantuan dari pemerintah yang kurang tepat sasaran.

2. Pengupahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil uji t dengan model terbaik *random effect model*, pengupahan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$) serta nilai koefisiennya sebesar $3,78E-06$. Harga barang dan jasa setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga harus diikuti adanya kenaikan upah mereka. Apabila kenaikan keduanya tidak seimbang maka dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan mereka dengan baik. Hasil penetapan UMK yang jauh dari harapan para buruh sehingga banyak terjadi demonstrasi para buruh di beberapa wilayah disebabkan mereka merasa kesejahteraannya terancam.
3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil uji t dengan model terbaik *random effect model*, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0311 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,0311 < 0,05$) serta nilai koefisiennya sebesar -0,351538. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan kualitas pembangunan manusia dapat meningkat apabila ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dibarengi pemerataan distribusi pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi berfungsi efektif dapat memperbaiki pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan masih mengedepankan

kebutuhan infrastruktur dan peningkatan beberapa sektor. Sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin kurang mendapat perhatian yang menyebabkan kualitas masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dinyatakan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang tinggi sebagian besar masih dinikmati oleh golongan atas serta hasilnya banyak digunakan untuk konsumsi dan masih sedikit untuk produktivitas.

4. Tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2015-2019. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil uji F dengan model terbaik *random effect model*, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari nilai signifikansi ($0,000000 < 0,05$). Pengaruhnya dapat dilihat pada hasil uji koefisien determinasi sebesar 95,75%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (IPM) sebesar 95,75%. Sedangkan sisanya 4,25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi IPM ini memiliki peranan penting dalam upaya perbaikan pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.
5. Ekonomi Islam memandang pembangunan sebagai aktivitas yang sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manusia sebagai *khalifah fil arḍ* memiliki tanggung jawab dan tugas besar dalam pemeliharaan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan agar setiap individu dapat memperbaiki kualitas hidupnya agar dapat mengemban amanahnya dengan baik. Beberapa

langkah yang dapat dilakukan antara lain menuntut ilmu (pendidikan), menjaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup (ekonomi).

Pertama yakni pendidikan, banyaknya anak di Karesidenan Pekalongan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau putus sekolah sangat memprihatinkan sekali. Padahal Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Namun ada saja dari mereka (orang berpendidikan) tetapi moral dan akhlakanya kurang baik. Hal ini dapat terjadi karena masih lemahnya pendidikan agama di negara kita. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kedua yakni kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal baik itu bekerja maupun aktivitas ibadah kepada Allah SWT. Tanpa adanya kesehatan maka pemenuhan kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan. Namun masih terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan kesehatan di wilayah ini masih rendah. Daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah masih banyak memiliki masalah prioritas kesehatan yang harus diperhatikan. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi gizi yang baik menjadi faktor paling dominan. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kemiskinan di daerah bersangkutan sehingga mereka tidak dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Anjuran Islam dalam menjaga kebersihan lingkungan juga telah disepelekan yakni terkait

membuang sampah masyarakat sembarangan, kurangnya fasilitas sanitasi, dan membuang limbah industri sembarangan.

Ketiga yakni ekonomi yang sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga apabila tidak dapat terpenuhi maka kehidupan dunia akan rusak dan manusia akan hidup sengsara. Pentingnya seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, serta membantu orang lain yang membutuhkan. Apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat rendah maka mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Rendahnya nilai pengeluaran per kapita sebagai bukti rendahnya pendapatan yang mereka peroleh sehingga kebutuhannya sulit untuk terpenuhi. Oleh sebab itu, perlunya tolong menolong dalam Islam yakni orang yang kuat untuk membantu orang yang lemah. Islam pun sangat menganjurkan agar giat untuk bekerja dengan pekerjaan yang baik dan halal. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau bekerja keras sehingga tidak boleh bermalas-malasan atau hanya menunggu bantuan dari orang lain.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan berupa ketersediaan data *time series* yang masih singkat yakni menggunakan rentang waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 atau dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, adanya keterbatasan dalam penggunaan variabel bebas yang mempengaruhi Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yaitu hanya mencakup tiga variabel bebas antara lain tingkat kemiskinan, pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya meneliti dengan rentang waktu yang lebih lama dan lebih banyak menggunakan variabel bebas lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, rasio ketergantungan, ketimpangan distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dapat memberikan analisis data yang lebih baik dalam menerangkan indeks pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Kemudian masukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti IPM dalam peninjauan perspektif ekonomi Islam disarankan untuk menggunakan data perhitungan IPM dalam Islam atau disebut juga dengan IHDI. Perhitungan IHDI tersebut terdiri dari *hifdzu ad-dīn*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl*, dan *hifdzu al-māl*. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih spesifik mengenai IPM dalam perspektif Islam di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

C. Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan diharapkan harus serius dan telaten dalam meningkatkan kualitas manusia (IPM) melalui upaya pengentasan kemiskinan sehingga pembangunan manusia tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus menerapkan program yang lebih

pro terhadap masyarakat miskin yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelatihan pengolahan sektor unggulan domestik serta adanya penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Selain itu diharapkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga tidak adanya tumpang tindih sasaran penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat.

2. Pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota serta pengusaha dalam menetapkan besarnya upah minimum agar selaras dengan kebutuhan dan keadaan perekonomian yang ada di daerah yang bersangkutan. Sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dan memiliki standar hidup yang layak. Kemudian pemerintah juga harus memperhatikan adanya peningkatan upah minimum yang diterima masyarakat yang mana dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mereka.
3. Pertumbuhan ekonomi untuk kedepannya agar berorientasi pada pemerataan pendapatan serta adanya pemerataan hasil pembangunan di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan sektor. Namun juga harus memperhatikan perbaikan kualitas manusia khususnya pada aspek pendidikan (RLS) dan kesehatan (AHH) yang masih rendah. Hal ini dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang.

4. Bagi masyarakat agar mendukung dan ikut serta dalam berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan kualitas manusia di daerahnya. Masyarakat juga harus lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah sehingga masyarakat harus lebih produktif serta harus muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, L., Rindiyanti, L., & Sahara. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7 (2), 140-158.
- Ayub, M. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Brebes terus Bangkit Turunkan Angka Kemiskinan*. Brebes : BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 2019*. Jawa Tengah : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2019). *Kabupaten Batang Dalam Angka 2019*. Kabupaten Batang : BPS Kabupaten Batang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. (2019). *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2019*. Kabupaten Brebes : BPS Kabupaten Brebes.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. (2020). *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2020*. Kabupaten Pekalongan : BPS Kabupaten Pekalongan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2020). *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2020*. Kabupaten Pemalang : BPS Kabupaten Pemalang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. (2020). *Kabupaten Tegal Dalam Angka 2020*. Kabupaten Tegal : BPS Kabupaten Tegal.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2018). *Kota Pekalongan Dalam Angka 2018*. Kota Pekalongan : BPS Kota Pekalongan.
- Badan Pusat Statistik Kota Tegal. (2020). *Kota Tegal Dalam Angka 2020*. Kota Tegal : BPS Kota Tegal.
- Basuki, A.T. (2014). *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*. Yogyakarta : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Cahyanti, S. A. & Fevriera, S. (2020). The Effect of Regional Minimum Wage and Inflation on HDI in Central Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18 (2), 152-167.

- Caraka, R. E. & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*. Ponorogo : Wade Group National Publishing.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4 (1), 870-882.
- Harian Kompas. (2019, 08 Desember). *Fokus Indonesia pada 2020-2024 : Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Diakses pada 14 Juli 2021, dari <https://adv.kompas.id/baca/fokus-indonesia-pada-2020-2024-pembangunan-sumber-daya-manusia/>
- Harjunadhi, J. T. & Farida R. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 16 (2), 241-249. Doi:<http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v16i2.7272>.
- Herman. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru. *Jurnal Eko dan Bisnis : Riau Economics and Business Review*, 8 (1), 182-189. Doi:<https://doi.org/10.36975/je.v9i1.14>.
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). *Jurnal Eko dan Bisnis : Riau Economics and Business Review*, 9 (1), 20-24. Doi:<https://doi.org/10.36975/jeb.v9i1.14>.
- Isnawati, N. (2018). Pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kudus.
- Izzah, C. I & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 5 (2), 99-106.
- Jasasila. (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), 40-44. Doi:<http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v11i1.192>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta : Kadeputrian Bidang Kemaratan dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kosmaryati et. All. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2 (1), 10-20.

- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Jurnal of Regional and Rural Development Planning*, 1 (2), 202-216. Doi:<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>.
- Machmud, J. & Djau, D.S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, 2 (2), 101-109.
- Mahri, A.J.W. et all. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Mardani, R. (2021, 07 Juni). *Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Data Panel*. Diakses pada 28 September 2021, dari <https://mjurnal.com/skripsi/uji-asumsi-klasik-untuk-regresi-data-panel/>
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pengeluaran Pendidikan, dan Realisasi Pengeluaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Padangan Islam di Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman*, 6 (1), 130-144. Doi:<https://doi.org/10.24952/masharif.v6i1.1131>.
- Megantara, D. E. & Made, K.S.B. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9 (1), 91-119.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 1 (2), 117-122. Doi:<http://doi.org/10.31949.v1i2.1134>.
- Ningrum, J. W., Aziza, H. K. & Nurul, H. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 212-222. Doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>.
- Noviatamara, A., Ardina, T. & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (1), 53-60. Doi:<http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i1.1341>.
- Nugraha, H. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Kemiskinan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.Solo.

- Prihastuti, A. H. (2018). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4 (1), 1-8. Doi:<https://doi.org/10.33559/mi.v12i5.776>.
- Rahayu, N.A. (2019). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2017. *Skripsi*. Universitas Negeri Raden Intan. Lampung.
- Rusandi, T.Y. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Raden Intan. Lampung.
- Sari, E. & Yusniar, R. (2019), Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2017. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (2), 128-136. Doi:<http://dx.doi.org.10.31002/rep.v4i2.1427>.
- Salem, T. A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-2016. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Siregar, P.P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Net*, 1(1).
- Srihardianti, M., Mustafid & Alan, P. (2016). Metode Regresi Data Panel untuk Peramalan Konsumsi Energi di Indonesia. *Jurnal Gaussian*, 5 (3), 475-485.
- Sugiyono, L. (2020). Analisis Situasi Pembangunan Manusia Jawa Tengah di Jawa Tengah. *Jurnal Statistika*, 8 (1), 52-57. Doi:<https://doi.org/10.26714/jsunimus.8.1.2020.%25p>.
- Sulistyaningrum, A. N. & Muta'ali, L. (2020). Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. *Jurnal Bumi Indonesia*, 9 (4).
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Surahman, Rachmat, M., & Supardi, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan : Pusdik SDM Kesehatan.

- Tjoe, Y. (2018, 28 Agustus). *Pertumbuhan Ekonomi Selama 20 Tahun Hanya Dinikmati Orang Kaya Seberapa Parah Ketimpangan di Indonesia?.* Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://theconversation.com/amp/pertumbuhan-ekonomi-selama-20-tahun-hanya-dinikmati-orang-kaya-seberapa-parah-ketimpangan-di-indonesia-102107>.
- Triadani, D. (2017) Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Trianggara, N., Rahmawati, R. & Yasin, H. (2016). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan Spatial Data Panel Fixed Effect (Studi Kasus : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013). *Jurnal Gaussian*, 5 (1), 173-182. Doi:<https://doi.org/10.14710/j.gauss.v5i1.11040>.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5 (2), 265-292.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Wijiani, T.R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Yusuf, A. A. (2017, 06 April). *Ketimpangan dan Pertumbuhan yang Menyengsarakan*. Diakses pada 26 Juli 2021, dari <http://sdgcenter.unpad.ac.id/ketimpangan-dan-pertumbuhan-yang-menyengsarakan/>
- Zamharir, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum terhadap Human Development Index : Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori Lower Medium di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.